

**STRATEGI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PERHUTANAN  
SOSIAL DALAM RANGKA MITIGASI KONFLIK TENURIAL: STUDI  
KASUS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN GEDONG WANI**

**Skripsi**

**Oleh**

**Ranggit Setri Pinanggih  
2014151017**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM RANGKA MITIGASI KONFLIK TENURIAL: STUDI KASUS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN GEDONG WANI**

**Oleh**

**RANGGIT SETRI PINANGGIH**

Perhutanan Sosial merupakan salah satu solusi dari permasalahan konflik tenurial yang banyak terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan strategi implementasi pengembangan perhutanan sosial Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani berdasarkan faktor internal dan eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung, pada bulan Desember 2023-Januari 2024. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi secara langsung. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis faktor internal (kekuatan dan ancaman) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman), diagram SWOT menunjukkan bahwa posisi strategi implementasi Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani berada pada kuadran I atau strategi agresif yaitu situasi yang sangat menguntungkan dengan memanfaatkan seluruh potensi kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan dengan mengimplementasikan kegiatan fasilitasi, pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial, pengembangan industri kreatif berbasis komoditas lokal, pengembangan KUPS serta pendampingan secara intensif usaha produktif masyarakat, dan pembentukan serta pengefektifan fungsi koperasi.

**Kata kunci:** kehutanan, analisis, pemberdayaan, sosial, SWOT

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION STRATEGY OF SOCIAL FORESTRY DEVELOPMENT IN ORDER TO MITIGATE TENURIAL CONFLICT: CASE STUDY OF GEDONG WANI FOREST MANAGEMENT UNIT**

*By*

**RANGGIT SETRI PINANGGIH**

*Social Forestry is one of the solutions to the problem of tenurial conflicts that occur in Indonesia. The purpose of this study is to determine the implementation strategy of social forestry development of KPH Gedong Wani based on internal and external factors. This research was conducted in Gedong Wani Forest Management Unit, Lampung Province, in December 2023-January 2024. Data were collected using interviews and direct observation techniques. This research was analyzed using SWOT analysis. Based on the analysis of internal factors (strengths and threats) and external factors (opportunities and threats), the SWOT diagram shows that the position of the Social Forestry implementation strategy in the Gedong Wani Forest Management Unit is in quadrant I or aggressive strategy, which is a very favorable situation by utilizing all potential strengths to take advantage of existing opportunities. Strategies that can be applied are implementing activities in the form of facilitation, intensive coaching and technical guidance in supporting Social Forestry activities, developing creative industries based on local commodities, developing KUPS and intensive assistance to community productive businesses, and establishing and streamlining cooperative functions.*

*Keywords: forestry, analysis, empowerment, social, SWOT*

**STRATEGI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PERHUTANAN  
SOSIAL DALAM RANGKA MITIGASI KONFLIK TENURIAL: STUDI  
KASUS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN GEDONG WANI**

**Oleh:**

**Ranggit Setri Pinanggih**

**Skripsi**

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA KEHUTANAN**

**pada**

**Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **STRATEGI IMPLEMENTASI  
PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL  
DALAM RANGKA MITIGASI KONFLIK  
TENURIAL: STUDI KASUS KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN GEDONG WANI**

Nama Mahasiswa : **Ranggit Setri Pinanggih**


Nomor Induk Mahasiswa : 2014151017


Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.**  
NIP 198109272006042001

  
**Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.**  
NIP 196906011998021002

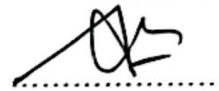
2. Ketua Jurusan Kehutanan

  
**Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM.**  
NIP 197310121999032001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.**



**Sekretaris : Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.**



**Anggota : Rommy Qurniati, S.P., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.**  
NIP. 196411181989021002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Ranggit Setri Pinanggih  
NPM : 2014151017  
Jurusan : Kehutanan  
Alamat Rumah : Dusun Sidomulyo, Desa Panca Tunggal,  
Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Strategi Implementasi Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Rangka Mitigasi Konflik Tenurial : Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



Ranggit Setri Pinanggih  
NPM 2014151017

## **RIWAYAT HIDUP**

Ranggit Setri Pinanggih (Penulis) atau akrab disapa Ranggit, lahir di Riau, 27 April 2022. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Raka Tomang dan Ibu Risminah. Penulis menempuh pendidikan di SDN 02 Sinarogan tahun 2008-2014, SMPN 2 Tanjung Bintang tahun 2014-2017, dan SMAN 1 Tanjung Bintang tahun 2017-2020. Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyulva) sebagai anggota pada periode tahun 2021/2022. Kegiatan keprofesional yang telah diikuti oleh penulis yaitu melaksanakan kegiatan magang selama 30 hari di UPTD KPH Gedong Wani, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Jaga Raga, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat pada bulan Januari-Februari 2023. Pada tahun yang sama bulan Juli-Agustus, penulis mengikuti kegiatan Praktik Umum (PU) selama 20 hari di Hutan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu KHDTK Wanagama, Jawa Tengah dan KHDTK Getas Kec. Keradenan, Blora, Jawa Tengah. Tanggal 18 Januari 2024, penulis resmi bekerja dan menjadi karyawan kontrak pada PT Biomedika Nusantara Indah.



## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Hutan Tanaman Rakyat Pada Gabungan Kelompok Tani Jaya Abadi Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani”. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P. selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
4. Ibu Susni Herwanti, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah membimbing penulis dengan penuh khidmat dan kesabaran, memberikan arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dengan penuh khidmat dan kesabaran, memberikan arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si. selaku Dosen Penguji sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, arahan, masukan, motivasi, nasihat, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi.
7. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang kehutanan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.

8. Segenap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Gedong Wani, terutama Ibu Dwi Maylinda, S.Hut., M.Si. beserta jajarannya yang telah memberikan izin pada kegiatan penelitian.
9. Orang tua penulis yaitu Bapak Raka Tomang, Ibu Risminah, yang selalu memberikan doa, arahan, kasih sayang, motivasi, nasihat, dan perhatian serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis mampu mencapai tahap ini.
10. Kakak penulis yaitu Yudha Radistyو yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.
11. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan
12. Teman-teman seperbimbingan Ranggit, Mona, Najwa dan Devan yang telah memberikan bantuan serta motivasi dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 (Beavers) serta seluruh keluarga besar Himasyilva
14. Seluruh staff di Jurusan Kehutanan atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Universitas Lampung.
15. Terima kasih kepada Raja Digital yang telah membantu kebutuhan per-dokumenan penulis
16. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT.
17. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertanggung jawab dan berjuang melawan rasa malas serta bekerja keras untuk melewati dan menikmati proses panjang skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024

  
**Ranggit Setri Pinanggih**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Karya tulis ini kupersembahkan dengan penuh rasa bangga untuk kedua orang  
tuaku tersayang,  
Ayahanda Raka Tomang Dan Ibunda Risminah*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2. Tujuan Penelitian .....	4
1.3. Kerangka Pemikiran .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	7
2.2. Konflik Tenurial .....	8
2.3. Perhutanan Sosial (PS) .....	9
2.4. Strategi dan Analisis SWOT.....	11
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	12
3.2. Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	13
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
3.4. Pengelolaan dan Analisis Data .....	16
3.5. Uji Reliabilitas Data .....	19
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
4.1. Matriks Analisis Faktor Internal.....	20
4.2. Kekuatan ( <i>Strength</i> ).....	21
4.2.1. KPH Gedong Wani Memfasilitasi Sosialisasi, Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis dalam Kegiatan Perhutanan Sosial .....	21
4.2.2. Sudah Terbentuk Kelompok Tani Hutan maupun Kelompok Tani Non Kehutanan .....	23
4.2.3. Sudah Adanya Lahan yang Dimanfaatkan Secara Agoroforestri .....	24
4.2.4. Sudah Adanya Kelompok Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani yang Mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Perhutanan Sosial .....	25
4.2.5. Areal Kerja KPH Gedong Wani Masuk Dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).....	26
4.2.6. Adanya Peraturan yang Mengatur Tentang Perhutanan Sosial.....	26

4.2.7. Sudah terjalannya kerjasama multi pihak dengan kelompok PS .....	27
4.2.8. Inovasi Usaha dalam Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).....	28
4.3. Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ) .....	29
4.3.1. Kurangnya Tenaga Pendamping dari Penyuluh Kehutanan dan Tim <i>Strengthening Social Forestry</i> (SSF) .....	29
4.3.2. Kelembagaan Kelompok Tani Kurang Berjalan Dengan Optimal .....	30
4.3.3. Kelompok Tani Kurang Memahami Mengenai Tujuan, Hak dan Kewajiban Sebagai Pemegang Izin Perhutanan Sosial.....	31
4.4. Matriks Analisis Faktor Eksternal .....	32
4.5. Peluang .....	32
4.5.1. Terbentuknya Lapangan Pekerjaan dengan Diterapkannya Program Perhutanan Sosial.....	32
4.5.2. Investor Berpotensi Untuk Menanamkan Modal .....	34
4.5.3. Adanya Dukungan dari Aparat Desa .....	34
4.5.4. Adanya Program SSF ( <i>Strengthening Social Forestry</i> ) yang Menyediakan Tenaga Pendampingan Perhutanan Sosial .....	35
4.6. Ancaman ( <i>Threats</i> ) .....	36
4.6.1. Pemukiman Semakin Bertambah yang Mengakibatkan Berkurangnya Lahan Hutan.....	36
4.6.2. Adanya Kepentingan Pihak Lain yang Berpotensi Konflik Tenurial Kehutanan .....	37
4.6.3. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Melestarikan serta Menerima Program Kehutanan .....	38
4.7. Penentuan Strategi pada Matriks SWOT .....	39
4.8. Strategi <i>Strength-Opportunity</i> ( <i>Agresif</i> ) .....	43
4.8.1. Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan dan Bimbingan Teknis Secara Intensif Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial .....	43
4.8.2. Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Komoditas Lokal.....	46
4.8.3. Pengembangan KUPS Serta Pendampingan Secara Intensif Usaha Produktif Masyarakat .....	48
4.8.4. Pembentukan dan Pengefektifan Fungsi Koperasi.....	49
4.9. Strategi <i>Weakness-Opportunity</i> (Stabilitas).....	51
4.9.1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyuluh .....	51
4.9.2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani.....	52
4.9.3. Sosialisasi dan Penyuluhan Dalam Skala yang Lebih Kecil Berdasarkan Pendekatan Perseorangan .....	53
4.10. Strategi <i>Strength-Treats</i> ( <i>Diversifikasi</i> ).....	54
4.10.1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat.....	54
4.11. Strategi <i>Weakness-Treats</i> ( <i>Defensive</i> ) .....	58
4.11.1. Pemetaan Konflik Tenurial dan Pemetaan Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan.....	58
4.11.2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan.....	59
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
5.1. Simpulan .....	61
5.2. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data izin perhutanan sosial di wilayah KPH Gedong Wani .....	2
2. Data desa definitif di wilayah KPH Gedong Wani .....	8
3. Populasi penelitian pada kelompok Perhutanan Sosial .....	13
4. Sampel penelitian pengembangan Perhutanan Sosial .....	13
5. Responden penelitian pengembangan Perhutanan Sosial .....	15
6. <i>Internal Strategic Factors Analysis Summary</i> (IFAS) .....	20
7. Luas Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani .....	26
8. <i>Eksternal Strategic Factors Analysis Summary</i> (EFAS) .....	32
9. Target indikatif Perhutanan Sosial SSF Lampung Selatan tahun 2022 .....	36
10. Pertambahan penduduk tahun 2020-2021 Badan Pusat Statistik .....	36
11. Perhitungan nilai internal dan eksternal .....	39
12. Matriks SWOT Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani .....	41
13. Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial .....	43
14. Kegiatan pendampingan meningkatkan usaha produktif masyarakat .....	49

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka pemikiran .....	6
2. Peta lokasi penelitian .....	12
3. Diagram SWOT .....	18
4. Sarana penghubung jalan .....	71
5. Sarana penghubung jalan aspal .....	71
6. Sarana penghubung jalan .....	71
7. Wawancara pengurus KTH .....	71
8. Wawancara pengurus .....	72
9. Wawancara pengurus KTH .....	72
10. Wawancara dengan .....	72
11. Wawancara pengurus .....	72



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang dan Masalah**

Adanya konflik yang berada pada kawasan hutan berpengaruh pada efisiensi pengelolaan hutan itu sendiri. Persoalan tersebut merugikan masyarakat yang bertempat tinggal dan memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan. Konflik yang terjadi pada kawasan hutan diakibatkan oleh ketidakpastian hukum yang berkenaan dengan sistem tenurial (Sylviani dan Ismatul, 2014). Konflik yang banyak terjadi di kawasan hutan dapat dikendalikan dengan dibangunnya kondisi masyarakat yang peduli terhadap hutan dan lingkungannya. Pengelolaan hutan terdahulu lebih memperhatikan pendekatan teknik dan ekonomi saja. Pada saat ini para pemegang kepentingan dipaksa untuk mendahulukan permasalahan sosial sebagai proses dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan hutan ditentukan dari kesuksesan memecahkan permasalahan sosial maupun ekonomi yang ada di masyarakat sekitar hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan solusi berupa skema Perhutanan Sosial (PS). Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat menjadi alternatif resolusi konflik yang paling memungkinkan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan penyerahan akses untuk masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya hutan sebagai resolusi konflik tenurial (Susilo dan Nairobi, 2019). Kewenangan terkait Perhutanan Sosial dari pemerintah pusat kepada KPH adalah fungsi fasilitasi penyiapan pemberian izin Perhutanan Sosial. Fasilitasi tersebut berupa penyusunan perencanaan, serta fasilitasi pengembangan usaha.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani merupakan salah satu unit pengelolaan hutan terkecil yang mengelola sebagian kawasan hutan produksi di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur dengan luas

pengelolaan ± 28.343,91 Ha. Masyarakat perambah yang bertempat tinggal di kawasan hutan KPH Gedong Wani mengakibatkan terbentuknya 48 desa definitif yang berada pada 14 kecamatan. Pembinaan serta pendampingan Perhutanan Sosial telah dilakukan KPH Gedong Wani sebagai solusi permasalahan konflik tenurial. Pembinaan serta pendampingan tersebut diimplementasikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) yang sudah atau belum mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial dan yang sudah atau belum teregistrasi. Skema Perhutanan Sosial yang diterapkan pada KPH Gedong Wani yaitu skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), skema Kemitraan Kehutanan dan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sampai saat ini, terdapat 19 KTH dan Gapoktan yang telah mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial dan 132 KTH yang telah teregistrasi di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. KPH Gedong Wani memasukkan Perhutanan Sosial secara eksplisit dalam strategi pengelolaan dan mengalokasikan blok pemberdayaan masyarakat dengan target seluas ± 23.704,02 Ha dan sudah terdapat izin PS ± 5.113,35 Ha, sehingga terdapat ± 18.590,67 Ha yang belum mendapatkan izin Perhutanan Sosial. Tabel 1 merupakan data izin PS yang telah tercapai di wilayah KPH Gedong Wani (Meylinda, 2021).

Tabel 1. Data izin perhutanan sosial di wilayah KPH Gedong Wani

No	Kelembagaan	No. Izin	Desa/Kecamatan	Luas (Ha)
<b>Hutan Tanaman Rakyat</b>				
1	Gapoktan Karya Muda	SK.220/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017	Jati Baru Kec. Tanjung Bintang	822
2	Gapoktan Gemah Ripah	SK.223/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,	Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang	273
3	Gapoktan Tani Maju	SK.224/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,	Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang	1.637
4	Gapoktan Jati Rukun	SK.221/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,	Jati Indah Kec. Tanjung Bintang	62
5	Gapoktan Jaya Abadi	SK.222/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,	Srikaton Kec. Tanjung Bintang	714
<b>Kemitraan Kehutanan</b>				
6	KTH Agro Sumber Rezeki	SK.8165/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/12/2020,	Sidoharjo Kec. Jati Agung	24,26
7	KTH Agro Forest Park	SK.7453/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/12/2020,	Karang Rejo Kec. Jati Agung	17,38

Tabel 1 (Lanjutan)

No	Kelembagaan	No. Izin	Desa/Kecamatan	Luas (Ha)
8	Gapoktan Wana Jaya	SK.1702/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/3/2021,	Marga Jaya Kec. Metro Kibang	74,43
9	Gapoktan Wana Bakti	SK.1708/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/3/2021,	Purwodadi Mekar Kec. Batang Hari	80,28
Hutan Kemasyarakatan				
10	KTH Rimbe Pasmah	SK.8508/MENLHK-PSKL/PKSP/PSL.0/12/2021,	Mulyosari Kec. Tanjung Sari	242,88
11	Gapoktan Jaya Mandiri	SK.10280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Margo Lestari, Kec. Jati Agung	47
12	KTH Mekarsari	SK.10285/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Margo Lestari, Kec. Jati Agung	144
13	KTH Wana Tani I	SK.10295/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Margo Lestari, Kec. Jati Agung	235
14	Gapoktan Wana Barokah	SK.10298/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Triharjo Kec. Merbau Mataram	302
15	KTH Maju Jaya Berkah	SK.10297/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Tanjung Harapan Kec. Merbau Mataram	49
16	KTH Sri Rejeki	SK.10287/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Malang Sari Kec. Tanjung Sari	41
17	KTH Wono Lestari	SK.10245/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari,	122
18	KTH Karya Makmur Lestari	SK.10247/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Kertosari Kec. Tanjung Sari	224
19	KTH Madu Sari	SK.10282/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022	Malang Sari Kec. Tanjung Sari	245
Total			<b>5.113,35</b>	

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan perhutanan sosial di KPH Gedong Wani yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang untuk menerima program kehutanan karena masyarakat beranggapan lahan yang sudah digarap akan diambil oleh pemerintah untuk dihutankan kembali, karena anggapan masyarakat yang salah tersebut, diperlukan pembinaan dan pendampingan secara intensif dari penyuluh kehutanan. Implementasi program Perhutanan Sosial terkadang tidak berhasil karena partisipasi masyarakat rendah, program tidak tepat sasaran, dan informasi tidak sesuai (Desmiwati, 2016). Berdasarkan dari uraian tersebut perlu dilakukan penelitian yang mengkaji strategi implementasi perhutanan sosial di wilayah kelola KPH Gedong Wani, dimana informasi dapat digunakan sebagai perencanaan kebijakan untuk menumbuhkan

minat serta partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Perhutanan Sosial.

Penelitian sejenis sebelumnya berupa strategi implementasi perhutanan sosial yang ada di KPH Gedong Wani telah dilakukan oleh Banuwa *et al.* (2018), penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di wilayah kelola KPH Gedong Wani yang akan digunakan untuk merencanakan tahapan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna pengembangan HTR. Dalam penelitian tersebut untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat digunakan analisis SWOT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi penelitian dan topik pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi skema perhutanan sosial dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian sejenis lainnya dilakukan oleh Sitorus *et al.* (2021). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan hutan rakyat di Pinang Jaya Kemiling Bandar Lampung. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa posisi strategi pengelolaan hutan rakyat pada lokasi tersebut berada pada kuadran tiga atau strategi diversifikasi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki dan menghindari ancaman yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah topik pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui strategi perhutanan sosial dengan menggunakan analisis SWOT. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis tersebut yaitu, penelitian yang akan dilakukan digunakan untuk menentukan strategi implementasi seluruh skema Perhutanan Sosial, sedangkan penelitian sejenis sebelumnya digunakan untuk menentukan salah satu strategi implementasi dari skema Perhutanan Sosial.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

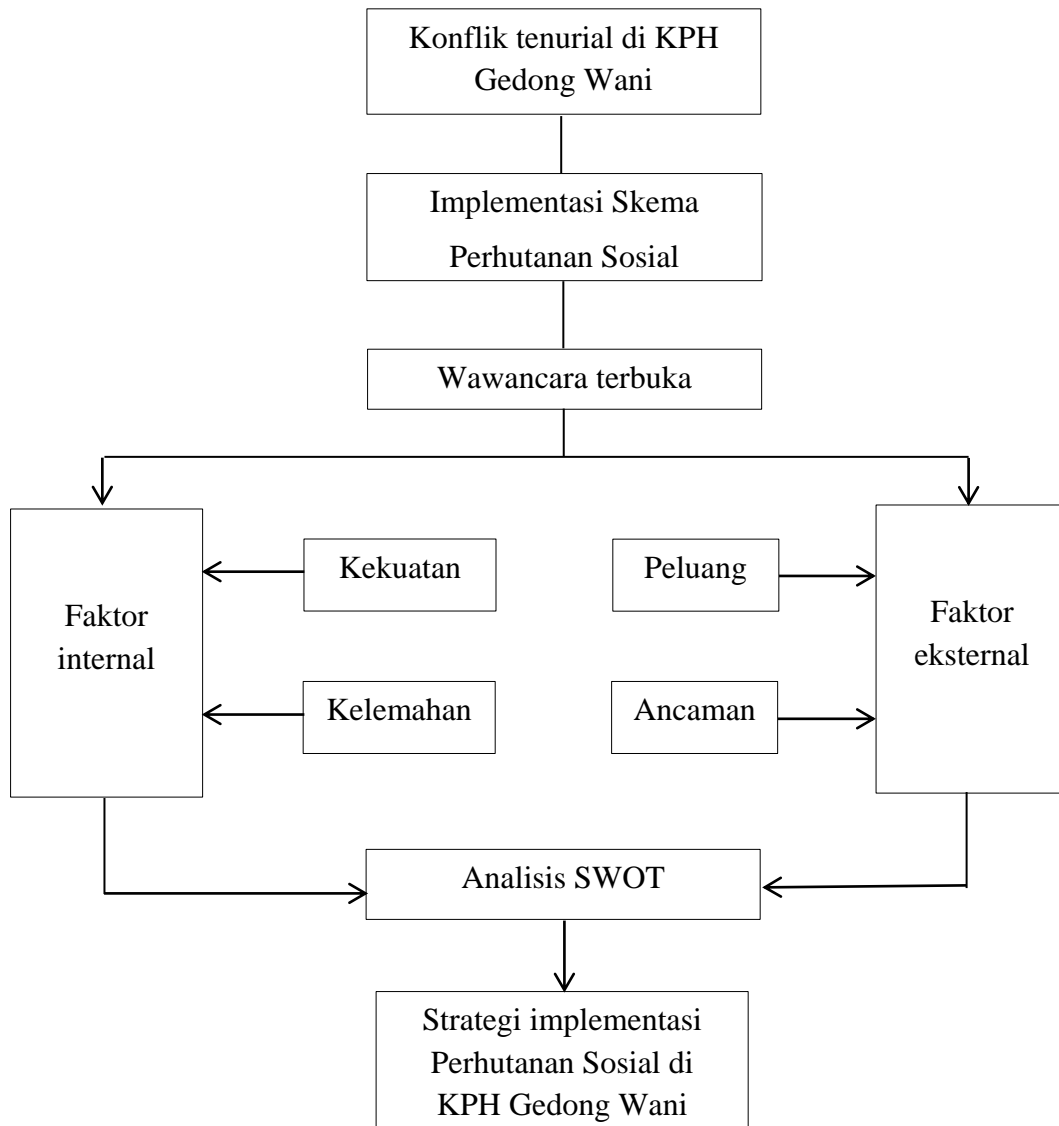
Berdasarkan latar belakang serta masalah tersebut, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi implementasi pengembangan perhutanan sosial KPH Gedong Wani berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan).

2. Menganalisis dan mengidentifikasi implementasi pengembangan perhutanan sosial KPH Gedong Wani berdasarkan faktor eksternal (peluang dan ancaman).
3. Merumuskan strategi implementasi pengembangan perhutanan sosial KPH Gedong Wani berdasarkan faktor internal dan eksternal.

### **1.3. Kerangka Pemikiran**

Adanya 48 desa definitif pada 14 kecamatan definitif di kawasan KPH Gedong Wani mengakibatkan terjadinya konflik tenurial. Konflik tenurial yang banyak terjadi yaitu perselisihan pengelolaan, pemanfaatan hutan serta pemakaian lahan hutan oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan sosial tersebut, pemerintah membentuk skema perhutanan sosial. Sasaran kunci skema perhutanan sosial yaitu dapat mengatasi persoalan konflik tenurial. Perhutanan sosial merupakan salah satu agenda politik pembangunan nasional untuk menyelesaikan konflik tenurial agar masyarakat perambah kawasan hutan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Untuk menjalankan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, Hutan Desa (HD), dan Hutan Adat (HA), diperlukan strategi yang terukur untuk mengimplementasikan pengembangan perhutanan sosial dengan tepat serta akurat. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka secara rinci kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani ditetapkan wilayahnya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 68/Menhut-II/2010 28 Januari 2010 serta Nomor: SK.427/Menhut-II/ 2011 27 Juli 2011, dengan luas sebesar  $\pm$  30.243 ha. Setelah mengalami perubahan luas wilayah, yang salah satunya akibat dilepasnya areal untuk pembangunan kota baru seluas 1.308 hektare, maka telah ditetapkan Kawasan Hutan Tetap pada KPH Gedong Wani oleh Menteri LHK melalui Keputusan Nomor: SK.74/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2017 13 Januari 2017, menjadi seluas  $\pm$  28.343,91 ha. Areal wilayah kerja KPH Gedong Wani meliputi Kawasan Hutan Produksi Tetap (KHPT), yaitu KHPT Way Kibang Register 37, dan KHPT Gedong Wani Register 40, KHPT Way Ketibung I Register 5, KHPT Way Ketibung II Register 35, yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan serta Kabupaten Lampung Timur (KPH Gedong Wani, 2013).

Kawasan kelola KPH Gedong Wani dibagi dalam blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK serta blok pemberdayaan masyarakat. KPH Gedong Wani juga dibagi dalam beberapa petak yang disesuaikan dengan kegunaannya dari hasil identifikasi lokasi serta potensi wilayah. Wilayah kelola KPH Gedong Wani dibagi ke dalam 3 resort, sebagai berikut:

1. Resort Kandis (Reg. 37 dan Reg. 40) : 13.303 Ha dengan luas areal perlindungan 566,25 Ha.
2. Resort Sekampung Ulu (Reg. 40) : 8.431 Ha dengan luas areal perlindungan 116,25 Ha.
3. Resort Ketibung (Reg. 5, Reg. 35 dan Reg. 40) : 6.226 Ha dengan luas areal perlindungan 252,50 Ha.

Secara geografis Provinsi Lampung menjadi jalan utama menuju Pulau Sumatera dimana memiliki jarak yang relatif dekat dengan Pulau Jawa, sehingga sekitar tahun 1960 Lampung merupakan salah satu lokasi transmigrasi penduduk yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Sebagian besar para pendatang yang masuk bekerja sebagai petani, terlebih lagi para pendatang tersebut tidak memiliki keterampilan yang cukup. Dampak dari melonjaknya pendatang dan tidak adanya upaya pengamanan kawasan hutan yang memadai, lama-kelamaan mereka membentuk suatu desa definitif (Tabel 2).

Tabel 2. Data desa definitif di wilayah KPH Gedong Wani

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Definitif		
1	Lampung Selatan	Katibung	5		
		Merbau Mataram	5		
		Tanjung Bintang	6		
		Tanjung Sari	8		
		Jati Agung	8		
		Natar	1		
		Way Sulan	1		
		Candi Puro	1		
		2	Lampung Timur	Sekampung	3
				Marga Tiga	2
Sekampung Udik	2				
Metro Kibang	3				
Batang Hari	2				
		Waway Karya	1		
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>48</b>		

## 2.2. Konflik Tenurial

Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*) (Kasim Abidin, 2015). Menurut Handayani *et al.* (2022), konflik merupakan hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kepentingan dan tujuan yang saling bertentangan. Berdasarkan pada Sylviani dan Ismatul (2014), tenurial atau dalam istilah lain *tenure* atau



dalam bahasa Latin *tenere* berarti: memelihara atau memiliki. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan menyatakan bahwa Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan hutan serta sumber daya alam lainnya. Tenurial sebagai sekumpulan hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Hak menggunakan lahan sebagai lahan untuk menanam tanaman subsisten, pengembalaan dan pemanfaatan hasil hutan.
2. Hak mengontrol dalam membuat keputusan sebagaimana lahan harus digunakan.
3. Hak mentransfer tanah seperti menjual atau menggadaikan, mewariskan dan merelokasi hak guna lahan.

Rendahnya kepastian penggunaan lahan hutan merupakan penyebab timbulnya konflik tenurial. Konflik tenurial dapat diperburuk oleh perbedaan pendapat para pihak terkait dan atau aktivis lingkungan mengenai penggunaan lahan hutan dan sumber dayanya. Perlu pertimbangan berbagai sudut pandang dalam penyelesaian konflik tenurial serta perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta sosial di mana konflik tenurial tersebut terjadi (Handoko dan Yumantoko, 2015).

### **2.3. Perhutanan Sosial (PS)**

Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan lahan hutan negara ataupun hutan hak/adat secara berkelanjutan dengan masyarakat menjadi tokoh utama (Kumar, 2015; Laksemi *et al.*, 2019). Tujuan dari Program Perhutanan Sosial yaitu sebagai keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Menurut Maryudi *et al.* (2012) dan Syahputra (2019) prinsip utama dari PS yaitu hak, mata pencaharian, dan konservasi. Perhutanan Sosial menjadi solusi dari permasalahan kehutanan untuk pengelolaan hutan yang lestari dengan dasar partisipasi dari masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Perhutanan Sosial secara keseluruhan bergantung pada partisipasi masyarakat yang berada pada kawasan huta maupun sekitar kawasan

hutan (Kaskoyo *et al.*, 2014). Berdasarkan Peraturan MENLHK No 83 2016 mengenai Program Perhutanan Sosial, perhutanan sosial bertujuan untuk pemberian izin pengelolaan serta sebagai solusi konflik tenurial dan pelestarian dengan keadilan, keberlanjutan, bertanggung gugat, kapasitas hukum dan partisipatif (Rahayu dan Joko, 2021).

Bentuk skema dalam Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Adat. Hutan Desa yaitu kawasan hutan yang terletak di fungsi lindung maupun produksi yang tidak memiliki perizinan, yang kemudian diserahkan pada lembaga desa sebagai pengelola pemanfaatan berdasarkan fungsinya dan pengelolaan yang lestari (Hermawan, 2021). Hutan Kemasyarakatan merupakan pemberian izin kepada gapoktan, koperasi, perorangan, kelompok masyarakat, atau kelompok tani untuk memanfaatkan dan mengelola hutan pada hutan lindung maupun produksi (Ardiputri, 2021). Kemitraan Kehutanan merupakan pemberian akses legal pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPPKH) atau masyarakat untuk memanfaatkan lahan (Rahman, 2021). HTR merupakan skema pemberian akses legal yang disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH), gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut), koperasi tani hutan (Koptanhut), professional kehutanan atau perseorangan dengan membentuk kelompok atau koperasi dengan masyarakat setempat untuk dapat mengelola serta memanfaatkan kawasan hutan produksi (Rahman at al. 2021). Hutan adat berada pada kawasan masyarakat hukum adat. Persetujuan Perhutanan Sosial diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK dengan masa berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang. Dasar hukum yang digunakan dalam skema Perhutanan Sosial yaitu Permen LHK No. 9 2021 mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial. Ardiputri (2021), Hermawan (2021), Rahman (2021) menyatakan, dengan menerapkan Skema Perhutanan Sosial, masyarakat akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Pengakuan serta perlindungan hukum dalam memanfaatkan serta mengelola kawasan hutan.
2. Menyelesaikan sengketa pengelolaan sumber daya hutan.

3. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
4. Adanya peluang masuknya Program Pemerintah, *Creating shared value* (CSV) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemanfaatan hutan dalam skema Perhutanan Sosial dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK).

#### **2.4. Strategi dan Analisis SWOT**

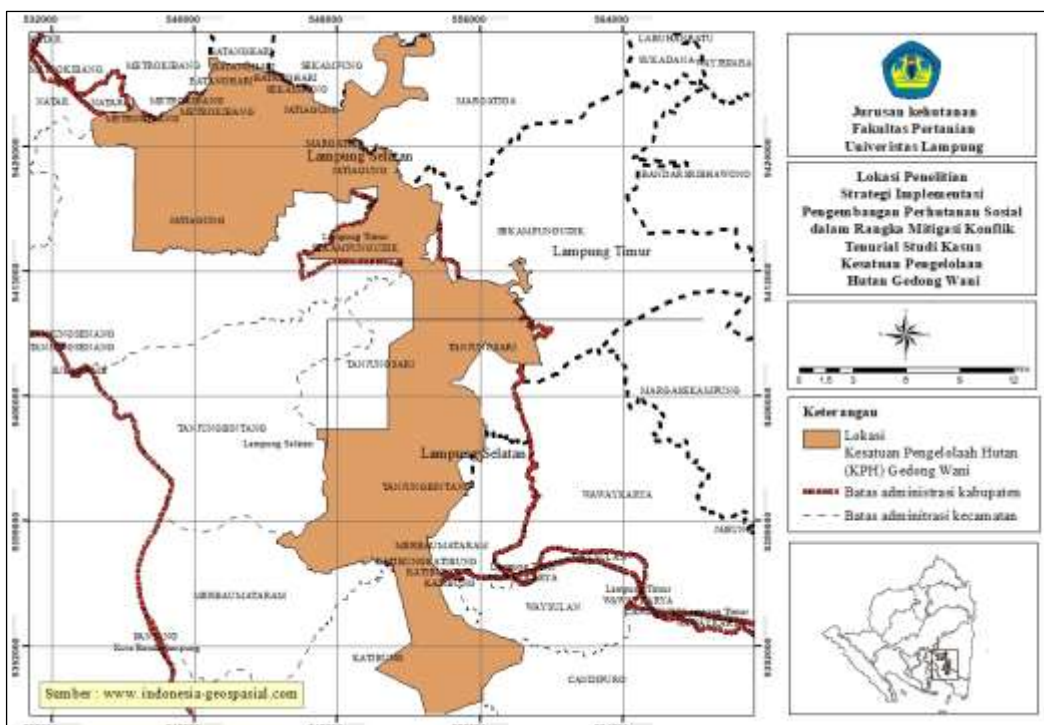
Strategi merupakan suatu tujuan jangka panjang serta rumusan pada semua alokasi dan pendayagunaan sumber daya agar tercapainya tujuan suatu program yang merupakan sekumpulan rekomendasi kritis untuk perencanaan tindakan dan penggunaan proporsi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memperhatikan perspektif jangka panjang yang ideal dari perseorangan maupun organisasi (Ramadhan dan Fivi, 2013). Secara umum strategi merupakan penentuan rencana jangka panjang pada organisasi, diiringi dengan penyusunan secara sistematis cara agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai (Selvia, 2017).

Analisis SWOT merupakan salah satu cara untuk penentuan strategi pengelolaan yang berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor yang berdampak dalam perumusan strategi untuk tahap perencanaan, analisis ini berdasarkan logika dalam meningkatkan kekuatan (*strength*) serta peluang (*opportunities*), dan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) serta ancaman (*threats*) (Rangkuti, 2021). Bila diterapkan secara berkesinambungan, sistem ini dapat berdampak signifikan untuk rancangan strategi yang memberikan informasi untuk mendapatkan peluang dan ancaman yang ada di dalam suatu instansi.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 di KPH Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan. Banyaknya masyarakat yang merambah kawasan hutan Gedong Wani berakibat pada terbentuknya 48 Desa definitif serta 14 Kecamatan definitif. KPH Gedong Wani menjadi pilihan dalam penelitian ini karena kawasan tersebut merupakan salah satu target dari pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Lampung.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

### 3.2. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Populasi penelitian pada Perhutanan Sosial yaitu seluruh kelompok Perhutanan Sosial yang ada di KPH Gedong Wani (Tabel 3). Pemilihan kelompok Perhutanan Sosial sebagai sampel penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Tiga skema Perhutanan Sosial yang diterapkan oleh KPH Gedong Wani, yaitu HTR, HKm, dan Kemitraan Kehutanan (Tabel 3). Masing-masing skema tersebut diwakili setengah dari setiap izin skema Perhutanan Sosial (Tabel 4).

Tabel 3. Populasi penelitian pada kelompok Perhutanan Sosial

No	Kelembagaan	Desa/Kecamatan
<b>Hutan Tanaman Rakyat</b>		
1	Gapoktan Karya Muda	Jati Baru Kec. Tanjung Bintang
2	Gapoktan Gemah Ripah	Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang
3	Gapoktan Tani Maju	Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang
4	Gapoktan Jati Rukun	Jati Indah Kec. Tanjung Bintang
5	Gapoktan Jaya Abadi	Srikaton Kec. Tanjung Bintang
<b>Kemitraan Kehutanan</b>		
6	KTH Agro Sumber Rezeki	Sidoarjo Kec. Jati Agung
7	KTH Agro Forest Park	Karang Rejo Kec. Jati Agung
8	Gapoktan Wana Jaya	Marga Jaya Kec. Metro Kibang
9	Gapoktan Wana Bakti	Purwodadi Mekar Kec. Batang Hari
<b>Hutan Kemasyarakatan</b>		
10	KTH Rimbe Pasmah	Mulyosari Kec. Tanjung Sari
11	Gapoktan Jaya Mandiri	Margo Lestari, Kec. Jati Agung
12	KTH Mekarsari	Margo Lestari, Kec. Jati Agung
13	KTH Wana Tani I	Margo Lestari, Kec. Jati Agung
14	Gapoktan Wana Barokah	Triharjo Kec. Merbau Mataram
15	KTH Maju Jaya Berkah	Tanjung Harapan Kec. Merbau Mataram
16	KTH Sri Rejeki	Malang Sari Kec. Tanjung Sari
17	KTH Wono Lestari	Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari,
18	KTH Karya Makmur Lestari	Kertosari Kec. Tanjung Sari
19	KTH Madu Sari	Malang Sari Kec. Tanjung Sari

Penelitian dilakukan pada 3 dari 5 persetujuan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Penelitian pada skema Kemitraan Kehutanan dilakukan pada 1 dari 4 izin PS. Penelitian pada skema Kemitraan Kehutanan tidak dilakukan setengah dari persetujuan skema yang ada (2 dari 4 kelompok) dan hanya dilakukan pada 1 kelompok, karena 3 kelompok yang lain, yaitu KTH Agro Sumber Rezeki, Gapoktan Wana Barokah dan Gapoktan Wana Bakti menyatakan

bahwa kelompok tersebut sudah tidak aktif lagi. Penelitian pada skema Hutan Kemasyarakatan dilakukan pada 1 kelompok karena hanya terdapat 1 kelompok yang memiliki persetujuan skema Hutan Kemasyarakatan (Tabel 4).

Tabel 4. Sampel penelitian pengembangan Perhutanan Sosial

No	Kelembagaan	Desa/Kecamatan
<b>Hutan Tanaman Rakyat</b>		
1	Gapoktan Tani Maju	Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang
2	Gapoktan Gemah Ripah	Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang
3	Gapoktan Jaya Abadi	Srikaton Kec. Tanjung Bintang
<b>Kemitraan Kehutanan</b>		
4	KTH Agro Forest Park	Karang Rejo Kec. Jati Agung
<b>Hutan Kemasyarakatan</b>		
5	KTH Rimbe Pasmah	Mulyosari Kec. Tanjung Sari
6	KTH Madu Sari	Malang Sari Kec. Tanjung Sari
7	Gapoktan Wana Barokah	Triharjo Kec. Merbau Mataram
8	Gapoktan Jaya Mandiri	Margo Lestari Kec. Jati Agung
9	KTH Maju Jaya Berkah	Tanjung Harapan Kec. Merbau Mataram

Populasi yang digunakan untuk menentukan faktor eksternal pada penelitian ini yaitu anggota setiap skema Perhutanan Sosial yang ada di KPH Gedong Wani dan kelompok pertanian non kehutanan yang berada di Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram. Populasi yang ditetapkan untuk menentukan faktor internal pada penelitian ini yaitu pengelola KPH Gedong Wani serta pakar. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yang merupakan metode pengambilan sampel yang memiliki kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Pengelola inti skema Perhutanan Sosial yang terpilih (ketua, sekretaris, bendahara).
2. Pengelola inti kelompok pertanian non kehutanan di wilayah kelola KPH Gedong Wani (ketua, sekretaris, bendahara).
3. Pengelola inti UPTD KPH Gedong Wani (Kepala UPTD Gedong Wani, kasubag TU, kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan dan polisi kehutanan).
4. Responden yang pakar pada program Perhutanan Sosial.

Sampel yang diambil dari populasi harus mewakili secara umum populasi tersebut. Untuk korelasi jumlah sampel yang baik yaitu 30-500 sampel. Menurut

Akdon dan Riduwan (2008) sampel paling sedikit yang dapat digunakan yaitu 30, 50, 75, 100, atau kelipatannya. Sampel pada penelitian ini berjumlah 39 responden dengan pembagian kriteria serta jumlah dijabarkan pada Tabel 5. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu metode pendekatan ilmiah untuk mrngumpulkan data yang bersifat statistik, dimana pengumpulan data untuk dianalisis berupa numerik (Sugiyono, 2017).

Tabel 5. Responden penelitian pengembangan Perhutanan Sosial

No	Sampel	Jumlah Responden	Keterangan
1	Pengelola inti dari 9 kelompok Perhutanan Sosial	27	Ketua, sekretaris, bendahara
2	Kelompok pertanian Tunas Muda 3	3	Ketua, sekretaris, bendahara
3	Pengelola inti UPTD KPH Gedong Wani	3	Kepala UPTD Gedong Wani, kasubag TU, kepala seksi perencanaan pemanfaatan hutan
4	Penyuluh kehutanan	4	Penyuluh kehutanan
5	Pakar	2	Dosen jurusan kehutanan Universitas Lampung, dan anggota <i>Strengthening Social Forestry (SSF)</i>
<b>Total</b>		<b>39</b>	

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi.

1. Data primer yaitu informasi maupun data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan pada responden di lapangan, dimana data yang diperoleh dari penelitian ini dari hasil wawancara dengan responden dan observasi secara langsung di lapangan untuk memastikan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar maupun di dalam kawasan hutan.
2. Data sekunder yaitu informasi maupun data yang didapatkan berdasarkan studi literatur yang dapat bersumber dari jurnal, buku bacaan ataupun internet yang bersangkutan dengan topik penelitian.

### 3.4. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis serta pengelolaan data digarap dengan menerapkan penjabaran analisis SWOT. Analisis SWOT menggunakan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) yang akan memaparkan faktor kekuatan serta kelemahan dan matriks EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) yang akan memaparkan faktor peluang serta ancaman dari sebuah institusi. Matriks ini digunakan untuk memperlihatkan kedudukan dari suatu instansi rentan atau kuat (Astuti, 2020). Analisis SWOT dipakai sebagai petunjuk dalam menentukan strategi *Strengths-Opportunities* (SO), *Strengths-Threats* (ST), *Weaknesses-Opportunities* (WO) dan *Weaknesses-Threats* (WT).

1. *Strengths-Opportunities* (SO), merupakan strategi yang menggunakan kekuatan serta peluang.
2. *Strengths-Threats* (ST), merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan sebagai solusi dalam mengatasi ancaman.
3. *Weaknesses-Opportunities* (WO), merupakan strategi menggunakan peluang dengan cara membatasi kelemahan yang ada.
4. *Weakness-Threats* (WT), merupakan strategi dengan cara membatasi kelemahan dan menghindari ancaman (Tampubolon *et al.*, 2022).

IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) merupakan matriks yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal, berikut merupakan langkah-langkah pembuatan IFAS berdasarkan Rangkuti (2021).

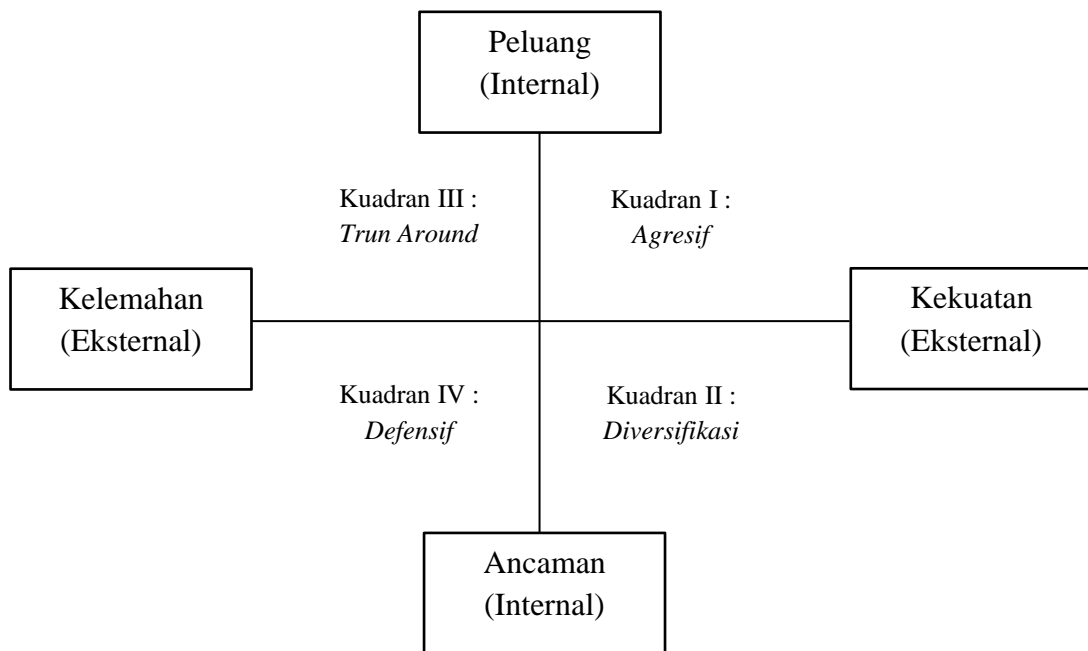
1. Menyusun pada kolom 1 peluang dan ancaman dalam pengembangan Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani.
2. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 dengan skala 1 (tidak penting sampai 4 (sangat penting)).
3. Menghitung rating untuk setiap faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1. Variabel yang masuk kategori kekuatan diberi nilai mulai dari 1 sampai dengan 4 (Sangat Setuju). Pada variabel kelemahan dilakukan kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan dinyatakan sangat setuju nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan dinyatakan tidak setuju nilainya adalah 4.
4. Kriteria yang digunakan untuk menentukan rating yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), dan Tidak Setuju (TS).



5. Mengalikan nilai bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.
6. Menjumlahkan skor faktor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan yang digunakan untuk menentukan posisi suatu perusahaan maupun lembaga.

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan matriks faktor EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) berdasarkan Rangkuti (2021) yaitu :

1. Menyusun pada kolom 1 peluang dan ancaman dalam pengembangan Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani.
2. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 dengan skala 1 (tidak penting sampai 4 (sangat penting)).
3. Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1 berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang yang sangat setuju diberi rating 4 hingga 1 untuk untuk nilai peluang tidak setuju. Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Jika nilai ancaman sangat setuju, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya tidak setuju ratingnya 4.
4. Kriteria yang digunakan untuk menentukan rating yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), dan Tidak Setuju (TS).
5. Mengalikan bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.
6. Menjumlahkan skor faktor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan yang digunakan untuk menentukan posisi suatu perusahaan maupun lembaga.



Gambar 3. Diagram SWOT

1. Kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan dengan memanfaatkan seluruh potensi kekuatan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Gambar 3).
2. Kuadran II meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi yaitu membuat strategi yang berbeda (lain dari biasanya) dengan memanfaatkan kekuatan internal, sehingga di masa yang akan datang memungkinkan terciptanya peluang (Gambar 3).
3. Kuadran III menyatakan peluang (eksternal) yang sangat besar, namun terdapat beberapa kendala berupa kelemahan (internal). Strategi yang dianjurkan yaitu meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat memanfaatkan serta meningkatkan peluang dengan baik (Gambar 3).
4. Kuadran IV merupakan posisi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman serta kelemahan. Strategi yang digunakan dengan membangun kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan (Gambar 3) (Rangkuti, 2021).

### 3.5. Uji Reliabilitas Data

Uji validitas dilakukan agar dapat mengetahui pengukuran yang dilakukan tepat dan akurat. Instrumen dikatakan tepat dan sesuai apabila tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya (Arikunto, 2010). Dalam teknik pemeriksaan dilakukan dalam dua cara, yaitu.

1. Triangulasi merupakan teknik yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi sumber berarti memastikan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda. Peneliti memastikan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari informan dengan melakukan metode wawancara kepada informan lainnya yang berbeda untuk mendukung informasi yang sudah didapatkan. Triangulasi merupakan pengumpulan data sejenis yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Peneliti melakukan teknik wawancara kepada informan yang berbeda dan observasi yang kemudian hasilnya dibandingkan. Peneliti melakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber agar informasi yang diberikan benar adanya. Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian untuk dilakukan perbandingan terhadap informasi yang didapatkan dari narasumber.
2. Diskusi dengan pakar dalam bentuk diskusi analitik atau konsultasi sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan dan diketahui.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di KPH Gedong Wani, di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal berupa kekuatan yaitu terdapat KPH yang memfasilitasi kegiatan PS, adanya sosialisasi, pendampingan, pembinaan kelompok tani hutan dan bimbingan teknis dalam kegiatan PS, sudah terbentuknya kelompok tani hutan maupun kelompok tani non kehutanan, sudah adanya lahan yang dimanfaatkan secara agoroforestri, sudah adanya kelompok PS di KPH Gedong Wani yang mendapatkan Surat Keputusan persetujuan PS, areal kerja KPH Gedong Wani masuk dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), adanya peraturan yang mengatur tentang Perhutanan Sosial, sudah terjalannya kerjasama multipihak dengan kelompok PS, kelompok PS dapat menciptakan inovasi usaha untuk meningkatkan pendapatan kelompok dan pengemangan KUPS. Untuk kelemahan yang menghambat pengembangan implementasi Perhutanan Sosial berupa kurangnya tenaga pendamping dari penyuluh kehutanan dan tim *Strengthening Social Forestry* (SSF), kelembagaan kelompok tani kurang berjalan dengan optimal dan kelompok tani kurang memahami mengenai tujuan, hak dan kewajiban sebagai pemegang izin PS.
2. Faktor eksternal berupa peluang yaitu terbentuknya lapangan pekerjaan, investor berpotensi untuk menanamkan modal, adanya dukungan dari aparat desa dan adanya program SSF (*Strengthening Social Forestry*) yang menyediakan tenaga pendamping PS. Sedangkan untuk ancaman yang mempengaruhi pengembangan implementasi Perhutanan Sosial berupa pemukiman semakin bertambah, adanya kepentingan pihak lain yang

berpotensi konflik tenurial, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melestarikan kawasan hutan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan program kehutanan.

3. Strategi implementasi pengembangan Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani dengan mengimplementasikan strategi *agresif* yaitu mengarahkan seluruh potensi kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi tersebut diterapkan dengan melakukan kegiatan berupa fasilitasi, pendampingan pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial, pengembangan industri kreatif berbasis komoditas lokal, pengembangan KUPS serta pendampingan secara intensif usaha produktif masyarakat, dan pembentukan serta pengefektifan fungsi koperasi.

## 5.2. Saran

Saran Untuk penelitian yang dilakukan di KPH Gedong Wani berupa Strategi Implementasi Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Rangka Mitigasi Konflik Tenurial: Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya resolusi konflik yang baik dalam penyelesaian masalah tenurial di kawasan KPH Gedong Wani. Dalam penyelesaian resolusi konflik, para pihak terutama pengelola kawasan yang berpotensi konflik lahan agar mempertimbangkan tahapan dalam analisis tenurial. Rendahnya kawasan yang berpotensi konflik lahan akan memudahkan program kehutanan diterima oleh masyarakat, terutama di wilayah kelola UPTD KPH Gedong Wani.
2. Program percepatan Perhutanan Sosial yang telah dilaksanakan hingga saat ini dinilai perlu upaya yang optimal dengan pendampingan, pembinaan oleh KPH Gedong Wani maupun dari SSF. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar hutan sehingga mampu meningkatkan hasil produksi. Diperlukan adanya pendampingan dengan petugas yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian maupun kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, N. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Program Kewirausahaan Ok Oce Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Akdon dan Riduwan. 2008. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Alfabeta. Bandung.
- Alma, B., Priansa, D.J. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta: Bandung.
- Altman, M. 2015. Cooperative organizations as an engine of equitable rural economic development. *Journal of Co-operative Organization and Management*. 3(1) : 14-23.
- Amal., Baharuddin II. 2016. Presepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Scientivic Pinsi*. 2(1) : 1-7.
- Amalia, A., Wahyu, H., Agung, B. 2012. Analisis strategi pengemangan usaha pada UMKM Batik. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 1(1) : 3-5.
- Amri, M., Heri, S. 2020. *Survei dan Indeks Perhutanan Sosial Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan*. Katadata Insight Center. Jakarta.
- Ardiputri, L. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.3-6.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Astuti, A.M.I. 2020. Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran (studi kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). *Jurnal Ilmu Manajemen*. 17(2): 62.
- Banuwa, I.S., Rahmat, S., Indra, G.F., Dian, N. 2018. Strategi implementasi

- kebijakan huta tanaman rakyat di KPH Gedong Wani. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(1) : 29-28.
- Barsimantov, A. J. 2010. Vicious and virtuous cycles and the role of exsternal non-government actors in community forestry in oaxaca and michoacan, Mexico. *Human Ecology: An Interdisciplinary Journal*. 38(1) : 49-63.
- Budiyanto, M. A. 2011. *Optimasi Pengembangan Penyuluh Industri Pangan Organik di Jawa Timur*. Teknik Industri, 12(2): 169-176.
- Desmiwati, N.F.N. 2016. Studi tentang persepsi dan tingkat partisipasi petani penggarap di hutan penelitian Parungpanjang. *Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan*. 4(2): 109-124.
- Fauzi, H. (2017). Pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(1) : 14-21.
- Febriyan, R.Y. 2022. *Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa)*. Universitas Mataram.
- Fisher, M., Moeliono, M., and Mulyana, A. 2018. *Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia: Recognition, Livelihood And Conservation?*. For. Rev.
- Hannan, R. 2014. The institution of co-operation: A pathway from governance to spillover and poverty reduction, *Journal of Co-operative Organization and Management*. 2(1) : 34-42.
- Handayani, G.A.K.R., Lego, K., Abdul, K.J., Jaco, B. 2022. The politics settlement of land tenure conflicts during jokowi's presidency. *Journal of Indonesian Legal Studies*. 7(2): 494-495.
- Handoko., Yumantoko. 2015. Perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial di KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 4(2): 158.
- Hardianto, D., Sufyadi, D., Suharjadinata. 2020. Hubungan antara kinerja penyuluh kehutanan dengan partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat. *Agribusiness System Scientific Journal*. 1(1), 1-8.
- Harinta, Y. W. 2011). Adopsi inovasi pertanian di kalangan petani di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. *Agrin*. 15(2) : 164-174.
- Hermanto., Dewa, K.S. 2011. Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Analisis Keijakan Pertanian*. 9(4): 386-388.

- Hermawan, I. 2021. *Buku Saku Permohonan Hutan Desa*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. 2-5.
- Herwanti, S.,Christine, W., Hari, K., Wahyu, H., Destia, N., Lia, M.,Nindya, T.P., Muhammad, A.K., Kadek, W.N., Rini, N. 2022. Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dalam memasarka produk hasil hutan bukan kayu. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*. 1(1) : 58-59.
- Hidayati, P.I. 2014. *Penyuluhan dan Komunikasi*. Universitas Kanjuruhan Malang.
- Imran, A.A.N., Nirwati., Andi, K.A.S. 2022. Implementation of forest extension methods in improving the knowledge and skills of forest farmers in Maros District (Case study on forestry extension methods in Tompobulu District, Maros Regency). *Junal Penelitian Wallacea*. 11(2): 94-95.
- Indasari, Y. 2020. Efisiensi saluran distribusi pemasaran kopi rakyat di Desa Gending Waluh, Kecamatan Sempol (Ijen), Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*. 14 (1): 44-50.
- Kaskoyo, H., Mohamed, Abrar, J., Inoue, M. 2014. Present state of community forest (Hutan Kemasyarakatan/HKm) program in a protection forest and its challenges : case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Science*. 30(1) : 17.
- Kasim, F, M., Abidin, N. 2015. *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi*. Unimal Pres: Aceh.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Sk. 2111/Menlhk-Pktl/Ren/Pla.0/4/2020 *Tentang Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V)*.
- Kumar, V. 2015. Social Forestry in India: *Concept and Schemes*. *Van Sangyan* 2(11): 18–20.
- Laksemi, N.P.S.T. 2019. Perhutanan sosial berkelanjutan di provinsi bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Silva Lestari*. 7 (2).
- Larasati, A.P., Christine, W., Indra, G.F., Hari, K. 2021. Peran kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*. 4(1) : 39.
- Lewerissa E. 2015. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan di Desa Wongongira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestry* 10 (1) :11-12



- Maryudi, A. 2012. Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics* 14(1): 1–5.
- McDougall, C., Pandit, B.H., Banjade, M.R., Paudel, K.P., Ojha, H., Maharjan, M., Rana, S., Bhattarai, T., Dangol, S. 2009. *Facilitating Forests of Learning: Enabling an Adaptive Collaborative Approach in Community Forest User Groups: a Guidebook*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2015. *Kriteria Penetapan Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan (WKPK)*. Jakarta.
- Meylinda. 2021. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Tahun 2021 Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani*. Bandar Lampung: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Mujiburrahmad, M., Muljono, P., dan Sadono, D. (2015). Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi. *Jurnal Penyuluhan*. 10(2), 141–150.
- Muktasam, A., Reid, R., Race, D., dan Perdana, A. 2019. *Extention Approaches to Promote Effektive Adoption of Agroforestri Practices Lessons Learned From Indonesia*. World Agroforestri Congress.
- Mutaqin, D.J., Isniatul, W. Nur, H.R. 2022. Analisis kegiatan perhutanan sosial dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19. *Bappenas Working Papers*. 5(2): 165.
- Nursyamsi, D., Siti, M., Septalina, P., Revo, A.M., Risnawati., Yovva N., Darif. I. 2022. *Data Statistik SDM Penyuluhan Pertanian 2021*. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian: Jakarta.
- Purnomo, R.A. 2016. *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Banyumas: Nulisbuku.com.
- Prasetyono, D.W. 2019. Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani sebagai pilar pemberdayaan petani. *Prosiding PKM-CSR*. 2(2019): 1285-1293.
- Prastiwi, A.M. 2020. *Survei dan Indeks Perhutanan Sosial Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan*. Katadata Insight Center.
- Rahayu, M.R., Joko. 2021. *Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang*. 3(2): 545-546.
- Rahman, A. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Kemitraan Kehutanan*. Direktora Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. 2-5.

- Rahman, A., Ruhiyat., Hanny, N., Muhammad, I, F., Dhimas, T, F, S., Dania, D, C., Muhammad, F. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Tanaman Rakyat*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- Rahmawati, F. 2009. Pengembangan industri kreatif melalui pemanfaatan pangan lokal singkong. *Seminar Nasional "Peran Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan Industri Kreatif"*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rakib, M. 2017. Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sebagai penunjang daya tarik wisata. *Jurnal Kepariwisataan*. 1(2) : 54-69.
- Ramadhan, A., Fivi, R.F. 2013. Analisis SWOT sebagai landasan dalam menentukan strategi pemasaran (Studi McDonald's Ring Road). *Media Infromasi Manajemen*. 1(4).
- Rangkuti, F. 2021. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, A. 2012. Metode komunikasi penyuluhan pada petani sawah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(1) : 32.
- Ruhiat. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan HTR*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. 5-8.
- Rishamsyah, R. 2013. Standarisasi sarana dan prasarana untuk pengembangan tenaga fungsional penyuluh kehutanan. *Civil Service Journal*, 7(1).
- Riyandoko, Martini E, Perdana A, Yumn A, Roshetko JM. 2016. *Situasi Terkini, Tantangan dan Kebutuhan dari Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Agroforestri di Indonesia*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
- Sabilla, A., Kustanti, A., Hilmanto, R. 2017. Kontribusi hutan terhadap kesejahteraan petani di Desa Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. Vol 5(2): 53-62.
- Selvia, S. 2018. *Alternatif Strategi pengembangan Taman Hutan Raya Banten di Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang*. Skripsi: Fakultas Ilmu Spisial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tritayasa, Serang.
- Senoaji, G. 2011. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*. 13 (1), 1.
- Senoaji, G., Muhammad, F.H., Iskandar. 2019. Resolusi konflik tenurial

pemanfaatan kawasan hutan di hutan lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 26(1): 28-35.

- Septyastuti, I. R. 2019. *Implementasi Program OK OCE Bagi Kesejahteraan Keluarga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shaputri, S.N.Y., Karania, F.A., Fadlikal, A., Dewi, R.G. 2023. Pemanfaatan ekonomi kreatif di sektor budaya untuk mengentaskan pengangguran berdasarkan Perda Kabupaten Bandung no.3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif. Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. 1(1) : 4.
- Sitorus, S.H., Rahmat, S., Susni, H. 2021. Strategi pengelolaan hutan rakyat Pinang Jaya Kemiling dengan analisis SWOT. *Jurnal Tengkawang*. 11(1) : 40-49.
- Sugiartono. E., Wenny. D. 2016. Model pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Politeknik Negeri Jember. Jember.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R dan D*. Jakarta: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumanto, S.E. 2009. Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 6 (1).
- Susilo, S., Nairobi. 2019. Dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat. *Jurnal ISEI Economic Review*. 3(1): 16-27.
- Syahputra, O.H. 2019. Alternatif pengelolaan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial. rambideun. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(1).
- Sylviani., Ismatul, H. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4): 309-311.
- Tampubolon, R., Fikarwin, Z., Agus, P. 2022. Strategi pendampingan dalam pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Serambi Engineering*. 7(1): 2510-2512.
- Thohirah, A., Abdul, W.A. 2021. Peralihan penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman di Kecamatan Kuta Malaka tahun 2018-2020 menggunakan ArcGis. *Jurnal Pendidikan Geosfer*. 6(2): 99.

- Tumurang, P.J., Melsje, Y.M., Melissa, L.G.T. 2019. Pendekatan metode penyuluhan pertanian usaha tai cabai di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupate Minahasa Utara. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebuna, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi*. 15(1) : 200.
- Wijiayanti, T., Agung, W., Yuli, A., Anggi, B. 2019. Penguatan usaha produktif masyarakat melalui pendampingan UKM di Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(1) : 265-270.
- Wulandari, C. dan Inoue, M. (2018). the importance of social learning for the development of community based forest management in Indonesia: the case of community forestry in Lampung Province. *Small-scale Forestry*. 17: 361–376.